

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan visi fundamental yang harus diwujudkan oleh setiap negara di dunia. Dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia berusaha melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin, salah satunya dengan cara pembangunan nasional. Agenda pembangunan ini dirancang untuk mendorong roda perekonomian dan memperluas penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya menjamin penghidupan memadai bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dapat terjadi apabila masyarakat telah memiliki kemampuan dan kemandirian dalam memfasilitasi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan bagi suatu negara sangat ditentukan oleh rendahnya tingkat kemiskinan yang ada di negara tersebut. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat, di mana peningkatan kemakmuran suatu negara secara menyeluruh akan menurunkan angka kemiskinan. Hubungan keduanya akan saling mempengaruhi dan hal itu akan menjadi parameter keberhasilan sekaligus target utama dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Persoalan kemiskinan senantiasa menjadi hambatan krusial dalam laju pembangunan nasional. Bagi Indonesia, isu ini merupakan tantangan struktural yang telah terjadi selama bertahun-tahun, menjadikannya prioritas utama dalam setiap perumusan kebijakan strategis pemerintah. Pada dasarnya, seseorang dikategorikan miskin ketika ia tidak lagi sanggup membiayai kebutuhan pokoknya, mulai dari urusan makan, pakaian, tempat tinggal, sampai dengan akses kesehatan dan pendidikan. Ketidakmampuan tersebut merampas kesempatan mereka untuk mencapai hidup yang layak, sehingga pada akhirnya mereka akan terus berputar-putar di dalam lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia saat ini mengalami persebaran yang tidak merata dan selalu terpusat di tempat-tempat tertentu. Hal ini biasa terjadi di daerah yang

memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya. Dalam perkembangannya kemiskinan Indonesia dalam tujuh tahun terakhir mengalami gejolak dari tahun 2019 hingga 2025. Pada tahun 2019 presentase kemiskinan sebesar 10,24%, kemudian naik pada tahun 2020 sebesar 10,83%, pada tahun 2021 sebesar 10,45%, pada tahun 2022 sebesar 10,30%, pada tahun 2023 sebesar 10,08%, pada tahun 2024 sebesar 9,17% dan pada tahun 2025 sebesar 8,73%. Tercatat bahwa beberapa provinsi yang berada di Indonesia bagian timur merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi selama beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan provinsi lainya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026 (Diolah Penulis)

Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020-2025

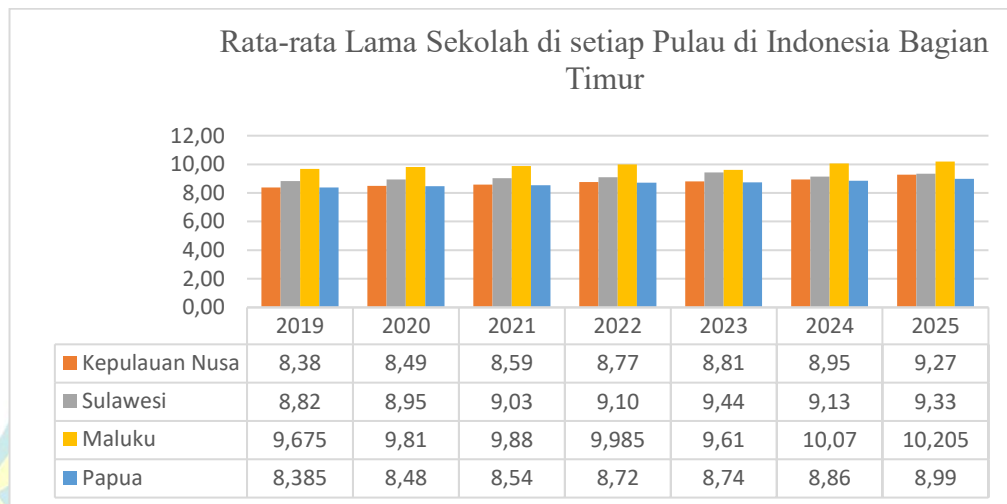
Melihat dari data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020-2025 provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi paling banyak yaitu dari provinsi di Indonesia bagian timur yakni setidaknya terdapat 9 provinsi dengan tingkat kemiskinan diatas 10%. Lima terbesar diantaranya pada tahun 2025 yaitu provinsi Papua Barat dengan angka kemiskinan 19,58%, Papua dengan angka kemiskinan 17,82%, NTT dan NTB dengan angka kemiskinan masing-masing yaitu 17,50% dan 11,38%., Maluku dengan angka kemiskinan 15,25%, dan Gorontalo dengan angka kemiskinan mencapai 12,62%. Berdasarkan data yang telah

dipaparkan tersebut, dapat terlihat bahwa provinsi yang berada di Indonesia Bagian Timur saat ini memiliki tingkat kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan menjadi salah satu fokus terbesar bagi pemerintah daerah yang ada wilayah tersebut. Berbagai permasalahan menjadi penyebab masih tingginya kemiskinan di Indonesia Bagian Timur seperti pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan jumlah penduduk semakin bertambah.

Fenomena tingginya angka kemiskinan di kawasan Timur Indonesia ini menciptakan hal yang bertentangan dalam pembangunan nasional. Di saat tren kemiskinan nasional secara agregat berhasil ditekan hingga angka 8,73% pada tahun 2025, provinsi-provinsi di kawasan Timur justru mengalami stagnasi, bahkan beberapa masih berada di angka belasan persen. Menurut Setiawan & Hakim (2023), ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dibiarkan terus-menerus tidak hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berpotensi memicu instabilitas sosial. Urgensi pengentasan kemiskinan di Indonesia Bagian Timur menjadi semakin mendesak mengingat kawasan ini sedang menghadapi bonus demografi. Jika peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perbaikan akses pendidikan dasar 12 tahun dan pemerataan distribusi pendapatan, maka penduduk usia produktif justru akan menjadi beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang baru, bukan motor penggerak ekonomi.

Sektor pendidikan memegang peranan krusial sebagai tolok ukur perkembangan suatu bangsa. Oleh karena itu, guna mencetak sumber daya manusia berpendidikan tinggi, pemerintah melakukan program wajib belajar 12 tahun yang mewajibkan penduduk menempuh pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat. Walaupun program ini sudah dicanangkan, pelaksanaannya belum bisa diterapkan secara menyeluruh di setiap wilayah. Ketimpangan dan ketidakmerataan infrastruktur, khususnya minimnya fasilitas dan bangunan sekolah untuk jenjang menengah atas, masih menjadi hambatan utama dalam merealisasikan target tersebut secara merata. Hal ini tentunya akan mengakibatkan turunya kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Ketika daerah tersebut memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menghasilkan

produktivitas daerah tersebut juga akan rendah, hal ini akan berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat pada daerah tersebut. Untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi maka penduduk harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dengan pendidikan yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026 (Diolah Penulis)

Gambar 1. 2 Presentase Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Pulau di Indonesia Bagian Timur Tahun 2019-2025

Melihat dari data Badan Pusat Statistik Indonesia rata-rata lama sekolah di pulau bagian timur Indonesia memiliki angka dibawah 10 tahun. Dari tahun 2019-2025 Papua, Kepulauan Nusa dan Sulawesi memiliki rata rata sekolah dibawah 9 tahun, dan hanya Maluku yang memiliki rata-rata lama sekolah diatas 10 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk yang berada pada provinsi tersebut hanya menempuh pendidikan 9 tahun atau sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sederajat sehingga tidak sesuai dengan target pemerintah Indonesia yang mewajibkan wajib belajar selama 12 tahun. Berdasarkan pernyataan dan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tersebut berarti bahwa tingkat pendidikan penduduk menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah provinsi di Bagian Timur Indonesia. Pendidikan dapat meningkatkan produktifitas dalam ekonomi dan juga meningkatkan penghasilan, apabila pendidikan sudah baik seseorang akan memiliki kemampuan yang diharapkan dapat memudahkan mereka

dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan sehingga pendapatan yang mereka dapat dari pekerjaan mereka dapat meningkat. Menurut Yang & Qiu (2016) pendidikan awal memiliki peran penting dalam investasi keluarga untuk menentukan mobilitas pendapatan mereka. Dengan jenjang pendidikan yang lebih baik, setiap individu memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Melalui pendidikan, kapasitas dan keterampilan individu akan terasah sehingga mereka jauh lebih siap untuk bersaing di dunia kerja. Oleh sebab itu, langkah utama yang perlu diprioritaskan untuk mengentaskan jerat kemiskinan dan mendorong taraf kesejahteraan masyarakat adalah melalui penguatan kualitas pendidikan

Selain kualitas sumber daya manusia menurut Oktaviani et al. (2022) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan atau ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurut Barber dalam (Moniyana & Pratama, 2021) ketimpangan ekonomi memperburuk kondisi kemiskinan bahkan, fenomena ketimpangan ini kerap dipandang sebagai wujud lain dari kemiskinan itu sendiri. Untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan terjadi di suatu wilayah, instrumen pengukuran yang lazim digunakan adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*). (Saleh & Rizkina, 2021) menjelaskan bahwa ukuran *Gini Ratio* memiliki rentang antara 0 sampai dengan 1 yaitu Nilai indeks Gini yang semakin mengarah ke angka nol menandakan bahwa sebaran pendapatan di suatu wilayah terdistribusi secara merata. Sebaliknya, jika angka koefisien ini berarah naik mendekati angka satu, hal tersebut menandakan tingginya tingkat kesenjangan atau memburuknya pemerataan ekonomi di daerah itu. Berikut merupakan Indeks Gini setiap provinsi di Indonesia Bagian Timur.

Tabel 1. 1 Rasio Gini dan Presentase Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur**Tahun 2019-2025**

Tahun	Rasio Gini	Presentase Kemiskinan
2019	0,367	13,64
2020	0,363	14,07
2021	0,361	13,74
2022	0,358	13,57
2023	0,353	14,13
2024	0,345	12,72
2025	0,333	12,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026 (Diolah Penulis)

Berdasarkan data BPS rata-rata ketimpangan di provinsi bagian timur dari tahun 2019-2025 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya namun rasio gini tersebut masih berada diatas 0,3 dan merupakan level ketimpangan menengah. Hal ini menandakan ketimpangan pendapatan tersebut masih cukup tinggi. Namun, Terjadinya penurunan gini ratio tersebut tidak diiringi dengan penurunan presentase kemiskinan, tertuma apada tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid-19 yang pada saat itu banyak masyarkat yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan kembali naik.

Di samping itu, kemiskinan di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor demografi, khususnya besaran populasi. Secara teoretis, populasi yang terus naik dapat berubah menjadi aset pembangunan yang potensial asalkan diimbangi oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Sebaliknya, jika terus nak lonjakan penduduk justru akan berbalik menjadi tanggungan berat bagi laju pembangunan apabila tidak didukung oleh kualitas individu yang memadai.

**Tabel 1. 2 Jumlah dan laju pertumbuhan Penduduk di Indonesia Bagian Timur
Tahun 2019-2025**

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2019	41.960,9	1,34
2020	43.429,6	3,50
2021	43.891,4	1,06
2022	44.462,4	1,30
2023	45.035,2	1,29
2024	45.635,6	1,33
2025	46.148,6	1,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026 (Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut bahwa pertambahan penduduk akan berdampak langsung pada melonjaknya permintaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat, yang mencakup makanan, pakaian, serta perumahan. Kemudian, pertumbuhan penduduk secara monevur ini berpotensi menyedot anggaran negara yang jumlahnya terbatas, dikarenakan ada aspek lain yaitu pemerintah harus terus membiayai fasilitas sosial, ekonomi, dan layanan kesehatan dimasa mendatang. Tingginya alokasi tersebut akan menyempitkan ruang fiskal pemerintah dalam upayanya menciptakan standar kesejahteraan masyarakat. Sehingga kondisi ini justru memicu terjadinya pewarisan kemiskinan antargenerasi, khususnya pada kelompok masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan literatur terdahulu, masih terdapat kesenjangan temuan empiris (*empirical gap*) yang memengaruhi kemiskinan di berbagai wilayah. Pada variabel ketimpangan pendapatan, Rasyid (2023) menemukan bahwa ketimpangan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kemiskinan. Namun, temuan ini

berbeda atau sebaliknya dengan studi yang dilakukan oleh Dianti & Sishadiyati (2024), yang membuktikan bahwa ketimpangan pendapatan dalam hal ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Inkonsistensi juga terjadi pada variabel pertumbuhan penduduk. Fajriansyah & Chandriyanti (2024) menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan kemiskinan. Sebaliknya, temuan lain pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk akan memiliki pengaruh yang tidak signifikan jika tenaga kerja terserap dengan baik (Fitriani & Sitohang, 2026).

Selain inkonsistensi temuan tersebut, penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan konteks wilayah (*contextual gap*). Sebagian besar studi terdahulu mengenai isu ini masih dilakukan dalam skala nasional secara agregat atau terpusat di wilayah Indonesia Bagian Barat. Meskipun studi terbaru seperti yang dilakukan oleh Weru et al. (2025) telah menyoroti kawasan Indonesia Bagian Timur, penelitian komprehensif yang mengisolasi variabel pendidikan, ketimpangan, dan kependudukan secara spesifik di 13 provinsi kawasan Timur masih sedikit. Maka dari itu, penelitian ini hadir sebagai pembaruan dengan menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap kemiskinan di wilayah Indonesia Bagian Timur menggunakan rentang waktu terbaru (2019–2025) guna menangkap dinamika ekonomi selama dan pasca-pandemi COVID-19. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian ilmiah mengenai “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Wilayah Indonesia Bagian Timur”

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Diharapkan penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya literatur keilmuan ekonomi pembangunan regional dan memberikan bukti empiris terbaru mengenai faktor-faktor pendorong kemiskinan di wilayah kepulauan. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan landasan penerapan perumusan kebijakan serta evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di 13 provinsi kawasan Indonesia Bagian Timur yang berguna menekan angka kemiskinan secara efektif.

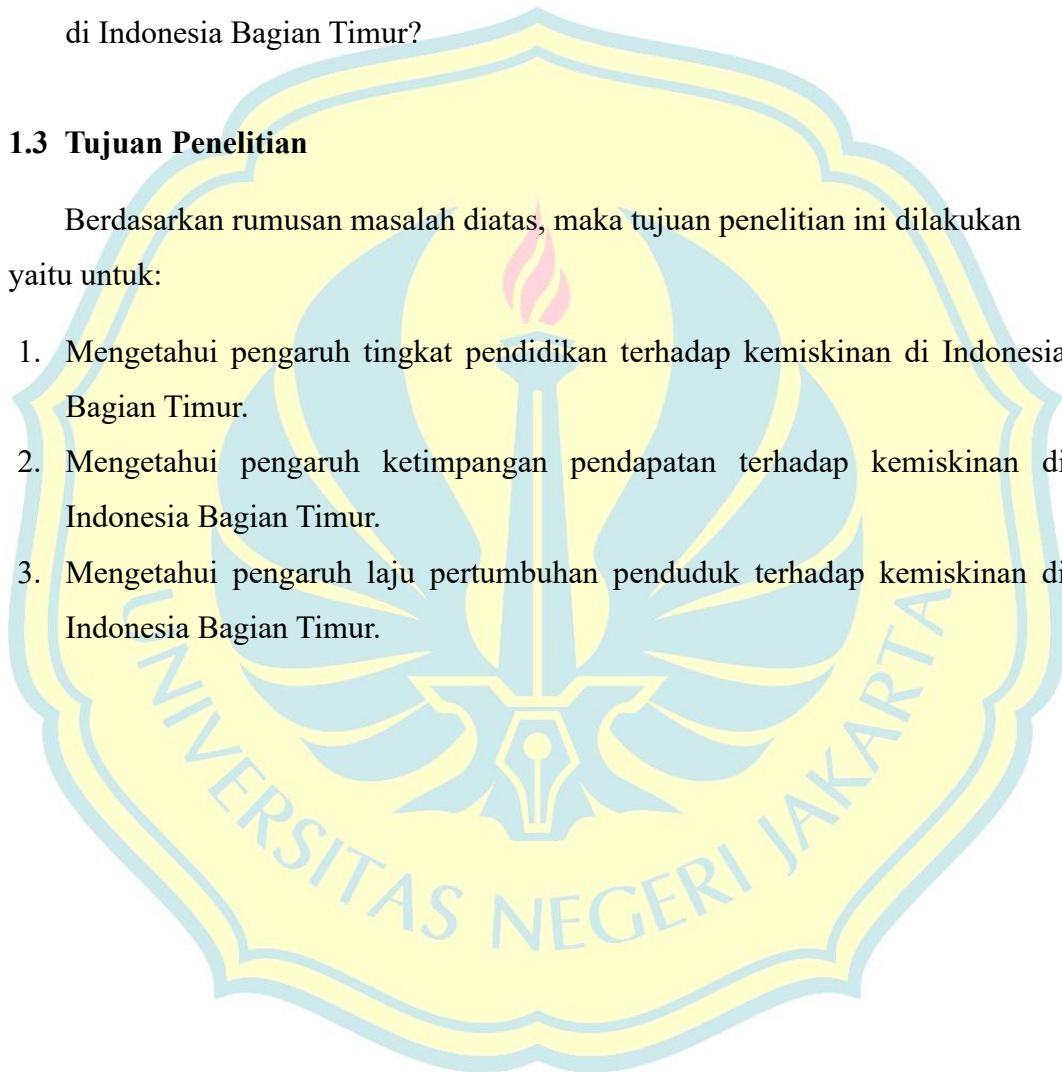
1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur.
2. Mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur.
3. Mengetahui pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur.



1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu teoritis dan praktis. Manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan akan ada tambahan pemahaman baru mengenai berbagai indikator penyebab kemiskinan secara nasional, khususnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur. Kemudian hasil peneitain ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi pendukung untuk studi-studi lanjutan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini berfungsi sebagai media pembuktian intelektual yang akan melatih ketajaman analisis mahasiswa, khususnya ketika mempraktikkan teori-teori pembangunan ekonomi yang telah dipelajari selama masa studi.

- b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan serta pemetaan data bagi aparat pemerintah maupun pemangku kepentingan agar dapat mengambil langkah strategis dalam menekan laju kemiskinan di wilayah Timur Indonesia.